

## ABSTRAK

**Siti Sukeni. NIM : 309311047. Peran Buruh Harian Lepas Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Keluarga Sesuai Dengan Pasal 4 Undang – Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PTP Nusantara III Afdeling IV kebun Gunung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran buruh harian lepas dalam meningkatkan sosial ekonomi keluarga sesuai dengan pasal 4 Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di PTP Nusantara III Afdeling IV Kebun Gunung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Penelitian dilaksanakan di PTP Nusantara III afdeling IV Kebun Gunung Pamela Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para buruh harian lepas yang bekerja di Afdeling IV PTPN III kebun Gunung Pamela yang berjumlah 33 orang. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan tabel frekuensi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Buruh /pekerja harian lepas adalah tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pekerja yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 2) Peran buruh harian lepas dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga sangat berperan. Hal ini dapat dilihat dari 33 responden, terdapat 23 responden (70%) yang mengatakan bahwa bekerja sebagai Buruh harian lepas dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun mereka hanya bekerja sebagai pekerja harian namun hal ini tidak mengurangi semangat dan kerja keras mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. 3) Berdasarkan hasil wawancara, buruh harian lepas tidak mengetahui Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan tingkat pendidikan buruh harian.